



SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN DOKUMEN MUTU PKPPS KHIDMATUSUNNAH BERBASIS AKREDITASI

Isti Fatonah¹, Andree Tiono Kurniawan², Karsiwan^{3*}

^{1,2} Program Studi PAI, IAIN Metro Lampung,

³ Program Studi PGMI, IAIN Metro Lampung,

³ Program Studi Tadris IPS, IAIN Metro Lampung,

e-mail : isti.fatonah@gmail.com¹,

andreetionok@gmail.com², karsiwan@metrouniv.ac.id³

Penulis Korespondensi. Karsiwan,

Tadris IPS, IAIN Metro Lampung

e-mail : karsiwan@metrouniv.ac.id

Kata kunci :

Dokumen Akreditasi
Pendampingan
Pondok Pesantren
PKPPS Khidmatusunnah

A B S T R A K

Tujuan program kegiatan pengabdian ini yaitu tersosialisasikannya delapan standar akreditasi pada PKPPS Khidmatusunnah melalui aplikasi Sispena, dan tersedianya SDM PKPPS yang terlatih dan terampil dalam pengelolaan dokumen penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan bentuk pendidikan kepada masyarakat kepada PKPPS Khidmatusunnah sebagai sasaran kegiatan. Belum terakreditasinya lembaga PKPPS ini dikarenakan berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman akan standar nasional pendidikan, kesadaran dalam pendokumentasian dokumen pendidikan, dan kesulitan pemenuhan unsur dokumen akreditasi, hingga masih asingnya kriteria 8 pada aplikasi Sispena. Sosialisasi sistem penilaian akreditasi diberikan dengan mengacu pada delapan standar nasional pendidikan. Pendampingan penyusunan dokumen akreditasi diperlukan dalam mengawal pemenuhan data dukung dan dokumen yang diperlukan dalam delapan standar nasional pendidikan

Keywords :

Accreditation Documents
Accompaniment
Islamic Boarding School
PKPPS Khidmatusunnah

A B S T R A C K

The purpose of this service activity program is the socialization of eight accreditation standards at PKPPS Khidmatusunnah through the Sispena application, and the availability of PKPPS human resources who are trained and skilled in managing documents for providing education in Islamic boarding schools. The method used in this community service activity uses a form of education to the community for PKPPS Khidmatusunnah as the target of the activity. The unaccredited PKPPS institution is due to various factors, such as lack of understanding of national education standards, awareness in documenting educational documents, and difficulties in fulfilling the elements of accreditation documents, as well as the unfamiliarity of criteria 8 in the Sispena application. The socialization of the accreditation assessment system is provided with reference to eight national education standards. Assistance in the preparation of accreditation documents is needed in overseeing the fulfillment of supporting data and documents required in the eight national education standards.

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia secara umum dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu pendidikan formal dan non formal yang kehadirannya merupakan pelengkap, penguat, dan penyempurna penyelenggaraan pendidikan sebagaimana mandat Undang Undang No. 20/2003. Pendidikan non formal merupakan jenis layanan pendidikan yang diberikan oleh sekelompok penyedia jasa layanan pendidikan. Adapun bentuk-bentuk penyelenggaraan pendidikan non formal seperti: SKB, PKBM, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), 4) Majelis Taklim, dan penyelenggaraan pendidikan sejenis lainnya (Hasan et al., 2021, hal. 171).

Penyelenggaraan sistem Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) merupakan suatu layanan pendidikan non formal yang diselenggarakan sebagai sarana pemerataan dan pemenuhan akses pendidikan berbasis nilai keagamaan. Penyelenggaraan Pendidikan pondok pesantren sejak 2020 telah diatur keberadaannya melalui PMA (peraturan Menteri Agama) 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren. Yaitu suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keagamaan berbasis pesantren pada pendidikan non formal dalam bentuk pengajaran dan pengkajian kitab kuning maupun bentuk lainnya dan sejalan dengan pendidikan formal (PASal 7, PMA No. 31). Kegiatan pembelajaran pada PKPPS meliputi beberapa kegiatan seperti pembelajaran klasikal, bandongan, sorogan, halaqoh dan Tahfidz. Penyelenggaraan PKPPS sebagaimana pendidikan formal lainnya selalu membekali peserta didik dengan beragam pengetahuan, keterampilan dan keagamaan dimana lulusannya diakui setara. Penyetaraan ini terlihat dari lulusan *Ula* setara MI/SD, lulusan *Wustha* setara MTs/SMP, lulusan *Ulya* setara dengan jenjang pendidikan menengah atas maupun pendidikan kesetaraan lainnya.

Penjaminan dan tata kelola sistem akreditasi diselenggarakan melalui aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi (Sispena) 3.0 dan terkoneksi langsung dengan data Direktorat Pendidikan Islam melalui aplikasi *Education Management Information Sistem* (EMIS) (BAN PAUD dan PNF, 2018). Penyelenggaraan akreditasi diharapkan memiliki tujuan dan fungsi antara lain, 1) sarana pengetahuan, 2) sarana akuntabilitas lembaga pendidikan, 3) sarana evaluasi dan pengembangan berkelanjutan (Awaludin, 2017, hal. 45). Terakreditasinya satuan pendidikan dapat menjadi ukuran sekaligus indikator kualitas mutu pada penyelenggaraan program pendidikan (Muldiani & Hadiningrum, 2020, hal. 25).

Penyelenggaraan dan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren dalam sistem tata kelola dan akreditasi secara nasional masih minim dan terbatas dalam partisipasi dan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan bukti minimnya angka partisipasi data akreditasi (Nuryanto & Irmade, 2019, hal. 88). Sepanjang 2018-2019 data PKPPS secara nasional dengan capaian peringkat akreditasi berdasarkan data Direktorat Pendidikan dan Pondok Pesantren Direktorat Jendral Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) pada semua satuan pendidikan PKPPS belumlah dikatakan menggembirakan. Adapun sebaran data akreditasi berdasarkan jenjang pendidikan baik Ula (73), Wustha (207), Ulya (55) maupun akreditasi satuan masih terbatas dengan jumlah satuan PKPPS sebanyak 1.620 sebagaimana diagram batang dibawah ini:



Sumber: Bahan Paparan Direktorat Pendidikan dan Pondok Pesantren Dirjen Pendis, 2020

Adapun penyelenggaraan kebutuhan dokumen mutu dalam sistem akreditasi PKPPS pada aplikasi Sispena pada BAN PAUD dan PNF di Provinsi Lampung masih minim dalam pemenuhan standar nasional pendidikan dan dibuktikan dengan adanya status akreditasi penyelenggara layanan pendidikan. Sejak tahun 2018-2019 data PKPPS di Provinsi Lampung yang telah terakreditasi berdasarkan data Direktorat Pendidikan dan Pondok Pesantren Dirjen Pendis baik yang telah terakreditasi baik layanan pendidikan Ula (1), Wustha (8), Ulya (5) maupun akreditasi Satuan masih sangat minim dengan jumlah total satuan sebanyak 83 satuan PKPPS, sebagaimana diagram batang dibawah ini:



Sumber: Bahan Paparan Direktorat Pendidikan dan Pondok Pesantren Dirjen Pendis, 2020

Penelitian dan pengabdian tentang kegiatan pengabdian masyarakat seperti pendampingan, pelatihan dan sosialisasi dokumen akreditasi pada satuan pendidikan telah banyak dilakukan. Pelatihan dan pendampingan yang telah peneliti lain lakukan antara lain: 1) Pelatihan dan Pendampingan tentang Persiapan Akreditasi dan Dampaknya Bagi Kesiapannya dalam Menyongsong Akreditasi (Herianto et al., 2020, hal. 512), 2) Kegiatan

Pendampingan Penyusunan Dokumen Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020 di SD Negeri Late (Wewe et al., 2021, hal. 35). Meskipun demikian, proses pendampingan dalam penjaminan mutu satuan pendidikan non formal khususnya PKBM dan PKPPS belum banyak dilakukan. Dengan pertimbangan tersebut, maka tim pengabdian merasa perlu untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan penyusunan dokumen akreditasi pada PKPPS Khidmatusunnah Lampung Timur. Terlebih berdasarkan hasil penelusuran dan wawancara dengan kepala PKPPS Khidmatusunnah, diperoleh data bahwa minimnya informasi, keterbatasan pengetahuan, dan pemahaman akan keterbutuhan dokumen pada proses akreditasi menyebabkan banyak penyelenggaraan pendidikan khususnya PKPPS ragu untuk menajajaki kemungkinan akreditasi lembaga.

Adapun tujuan dilaksanakannya program pengabdian pada masyarakat berbasis pondok pesantren mempunyai harapan agar PKPPS Khidmatusunnah yang didampingi memiliki perubahan baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam pendokumentasian dokumen mutu/kinerja lembaga. Adapun harapan dari program kegiatan ini, yaitu: 1) tersosialisasikannya delapan standar akreditasi pada PKPPS Khidmatusunnah melalui aplikasi Sispena, 2) tersedianya SDM PKPPS yang terlatih dan terampil dalam pengelolaan dokumen penyelenggaraan pendidikan di pondok pesantren.

B. MATERIAL DAN METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan bentuk pendidikan kepada masyarakat kepada PKPPS Khidmatusunnah sebagai sasaran kegiatan. Bentuk pendidikan kepada masyarakat merupakan suatu langkah dan prosedur dengan tujuan pada peningkatan kualitas, dan kemampuan SDM satuan pendidikan yang menjadi objek pendampingan dalam pengelolaan dan penyelesaian setiap problematika pendidikan yang dihadapi (Wijoyo, 2020, hal. 76). Adapun sasaran pendampingan pengabdian masyarakat ini ialah seluruh pengelola, tutor, dan tenaga kependidikan dimana dalam konteks pengabdian ini sebagai tim penyusun dokumen akreditasi.

Kegiatan pengabdian sosialisasi dan pendampingan akreditasi pada satuan pendidikan PKPPS Khidmatusunnah dilakukan dalam 2 tahap yaitu, 1) Sosialisasi, 2) Pendampingan dokumen akreditasi. Pada tahap sosialisasi, Tim Pengabdian akan memberikan materi dan pemahaman tentang borang akreditasi 8 standar pada aplikasi sispena 3.0 sehingga tercipta pemahaman dan saling pengertian akan keterbutuhan dokumen borang yang ada pada seluruh stakeholders PKPPS Khidmatusunnah. Pada tahap pendampingan, Tim Pengabdian akan memberikan penguatan dan pendalaman materi seputar isian aplikasi EDS-PA pada aplikasi Sispena 3.0 sekaligus memberikan daftar isian dokumen pada aplikasi tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah PKPPS Lampung Timur berdasarkan hasil observasi dan penelusuran data pada website emispendis.kemenag.go.id hanya memiliki 2 PKPPS dengan status telah terakreditasi dari jumlah PKPPS mencapai 16, adapun 2 pondok pesantren yang telah terakreditasi yaitu Darul Hidayah dan Riyodotul Ulum. PKPPS yang belum memiliki status akreditasi diantaranya Miftahul Ulum, Darun Nasyi, Raodhotul Riduan dan Khidmatusunnah. Kondisi ini mencerminkan bahwa masih minim dan terbatasnya perhatian, pendampingan dan pelatihan pada PKPPS dalam hal dukungan dalam memperoleh status akreditasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola PKPPS Khidmatusunnah ditemukan fakta bahwa terdapat kesulitan yang dialami PKPPS dalam menyusun dokumen akreditasi dan ketersediaan bukti fisiknya. Instrumen akreditasi sebagai panduan sekaligus acuan

dalam penyelenggaraan penilaian mutu pada satuan pendidikan seringkali mengalami perbaikan dan perubahan, data terkini menunjukkan instrument akreditasi satuan pendidikan (IASP) 2020, dengan karakteristik yang berbeda dengan instrument sebelumnya. Meskipun demikian, (Rahman, 2020, hal. 205) menjelaskan bahwa persoalan mendasar dalam penyelenggaraan proses akreditasi tidak terletak pada instrumennya, namun bagaimana setiap satuan pendidikan melakukan mekanisme, evaluasi dan kontrol mutu lembaga dengan berpedoman pada SNP. Dengan demikian, setiap satuan pendidikan memiliki kemampuan untuk mencari, menemukan dan memperbaiki setiap kekurangan dan kelemahan pada penyelenggaraan program pendidikan sekaligus memetakan strategi perbaikan kedepan.

a. Sosialisasi Dokumen Akreditasi Pada PKPPS Khidmatusunnah

Sosialisasi dokumen akreditasi kepada pondok pesantren mitra merupakan kegiatan pemberian informasi, pengetahuan dan keterampilan tentang pentingnya akreditasi dan dokumen pendukungnya dalam proses akreditasi satuan pendidikan (Hasan et al., 2021, hal. 26). Pemberian sosialisasi berkaitan erat dengan kebutuhan dokumen penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan permintaan pada aplikasi Sispna 3.0 sehingga setiap satuan pendidikan PKPPS yang akan melakukan proses akreditasi lebih siap, familiar dan berani dalam menghadapi proses akreditasi (Karsiwan, 2022, hal. 42). Sosialisasi dilakukan dengan menyampaikan delapan standar nasional pendidikan sebagai syarat dan jaminan mutu penyelenggaraan pendidikan dalam proses akreditasi (Indrawan, 2020, hal. 50).

Sosialisasi dilakukan pada Sabtu, 24 Juli 2022 bertempat di Aula Pondok Pesantren Khidmatusunnah. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan melibatkan dosen dan mahasiswa sebagai Tim pembantu di lapangan dan diikuti oleh para tutor, tenaga kependidikan dan SDM Khidmatusunnah agar memiliki kesepahaman dan kesadaran dalam pengelolaan dokumen akreditasi. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan suasana kekeluargaan dan penuh kehangatan dalam penyampaian dokumen akreditasi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan khususnya untuk program pendidikan non formal khususnya pendidikan pondok pesantren. Sehingga kegiatan sosialisasi diharapkan mampu menjembatani sekaligus sebagai katalisator penghubung kebutuhan masing-masing pihak dalam proses penjaminan mutu dan pertanggungjawaban penyelenggaraan proses pendidikan pada seluruh pihak terkait. Adapun kebutuhan dokumen akreditasi pada satuan PKBM maupun PKPPS sebagaimana tabel 1.

Tabel 1. Kebutuhan dokumen akreditasi pada Pendidikan Non Formal (PKPPS)

| No | Standar Nasional Pendidikan | Sub Standar Kompetensi dan Kebutuhan Data Dukung |
|----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Standar Kompetensi Lulusan | Kompetensi Lulusan, Profil Lulusan, Tim Pengembang Satuan |
| 2 | Standar Isi | Muatan Kurikulum, Acuan Pengembangan Kurikulum, Kalender Pendidikan |
| 3 | Standar Proses | Silabus, RPP, Monev Pembelajaran, Pengayaan atau Remedial |
| 4 | Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Ketersediaan data jumlah dan kualifikasi serta pengalaman kerja pendidik dan tenaga kependidikan |
| 5 | Standar Sarana dan Prasarana | Ketersediaan Peralatan Pembelajaran, bahan bacaan, media pembelajaran dan prasarana serta kepemilikannya |

| No | Standar Nasional Pendidikan | Sub Standar Kompetensi dan Kebutuhan Data Dukung |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Standar Pengelolaan | Ketersediaan dokumen profil pimpinan, diklat yang pernah diikuti, Visi, Misi, dan Tujuan lembaga, Kemitraan atau kerjasama, Pelaksanaan dan Pengawasan |
| 7 | Standar Pembiayaan | sumber pembiayaan dan pemanfaatannya, administrasi Keuangan seperti Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu |
| 8 | Standar Penilaian | Ketersediaan data panduan penilaian, data pelaksanaan penilaian, data peserta didik dalam pembelajaran, data penelusuran alumni, data prestasi yang pernah dipeoleh |

Sumber: Diadaptasi dari Pasal 3, PP No. 57/2021

Berdasarkan hasil kerja tim pengabdian dalam sosialisasi yang telah dilakukan, bahwa kegiatan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Tutor, dan tenaga kependidikan memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran yang baik akan pentingnya akreditasi bagi satuan pendidikan. Hal ini sekaligus menepis anggapan bahwa akreditasi selalu dipenuhi dengan kerumitan, kesulitan dan menjenuhkan selama mempersiapkan dokumen pendukung akreditasi.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Dokumen Akreditasi pada PKPPS Khidmatusunnah

b. Pendampingan Penyusunan Dokumen Akreditasi Pada PKPPS Khidmatusunnah Lampung

Pendampingan penyusunan dokumen akreditasi dilakukan pada Sabtu, 10 September 2022 bertempat di Aula Pondok Pesantren Khidmatusunnah setelah sebelumnya dilakukan kegiatan sosialisasi. Pendampingan dilakukan dengan fokus pada pemenuhan delapan standar nasional pendidikan, dan masing-masing standar ditelaah serta disiapkan dokumen pendukungnya. Standar kompetensi lulusan, maka pihak PKPPS diarahkan untuk menyiapkan dokumen seperti kualifikasi lulusan, profil lulusan, dan ketersediaan tim perumus, pengembang dan rekam jejak dalam pengembangan SKL berikut indikator pencapaiannya. Pada standar kedua, berupa standar isi, maka pihak PKPPS diarahkan untuk menyiapkan dokumen seperti struktur kurikulum beserta tim pengembangnya termasuk kalender pendidikan dan cakupan informasi di dalamnya. Sebagaimana muatan pendidikan pada pondok pesantren, maka diperlukan penyelarasan kurikulum antara kurikulum K-13 dengan kurikulum pondokan agar materi pendidikan agama dan umum dapat lebih cepat dikuasai oleh para santri.

Pada standar proses penyelenggaraan pendidikan, pihak PKPPS diarahkan untuk menyiapkan dokumen seperti: 1) dokumen silabus lengkap dengan tema, materi, metode dan rencana kegiatan lainnya; 2) dokumen RPP lengkap dengan materi, tujuan pembelajaran, langkah-langkah dan cara penilaian; 3) dokumen monev pembelajaran dan dilengkapi dengan materi pelajaran, daftar hadir tutor dan siswa, serta rekapitulasi tugas dan catatan perkembangannya; 4) keberadaan dokumen pengayaan, perbaikan atau remedial dengan dilengkapi dengan panduan, hasil dan tindak lanjut program yang dilaksanakan.

Pada standar pendidik dan tenaga kependidikan, pihak PKPPS diarahkan dan didampingi untuk menyiapkan dokumen seperti keberadaan dokumen kualifikasi pendidikan, dan pengalaman kerja baik pendidik maupun tenaga kependidikan. Untuk standar sarana dan prasarana, pihak PKPPS diarahkan dan didampingi untuk menyiapkan dokumen seperti keberadaan dokumen/daftar kepemilikan peralatan pembelajaran, bahan bacaan, dan media pembelajaran yang dimiliki satuan pendidikan.

Pada standar pengelolaan pendidikan, pihak PKPPS diarahkan dan didampingi untuk menyiapkan dokumen seperti keberadaan dokumen berupa profil pimpinan, jenjang pelatihan dan pendidikan yang pernah diikuti, dokumen visi, misi, tujuan lembaga yang dilengkapi dengan rencana strategis, rencana kerja tahunan, program unggulan dan rencana pembiayaan. Selain itu, keberadaan dokumen bukti kemitraan dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pengawasan juga diperlukan dan dikuatkan dengan bukti berupa MoU, MoA, dan dokumentasi lainnya.



Gambar 2. Kegiatan Pendampingan Penyusunan Dokumen Akreditasi

Pada standar pembiayaan, pihak PKPPS diarahkan dan didampingi untuk menyiapkan dokumen seperti keberadaan data penganggaran dalam bentuk dokumen RAB, sumber pembiayaan baik dari pemerintah, swasta, komite sekolah maupun kegiatan usaha lainnya. Selain itu, keberadaan dokumen keuangan berupa buku Kas umum, kas pembantu, laporan keuangan baik semester maupun tahunan diperlukan untuk penguatan data dukung. Untuk standar penilaian pendidikan, pihak PKPPS diarahkan dan didampingi untuk menyiapkan dokumen seperti keberadaan panduan penilaian PKPPS, pelaksanaan penilaian, dengan dibuktikan nilai harian, tengah dan semester peserta didik. Selain itu, keberadaan dokumen atau daftar peserta didik yang telah lulus juga diperlukan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan tahapan kegiatan pengabdian dan hasil yang dicapai maka kegiatan pengabdian yang telah dilakukan ini dapat dinyatakan berhasil. Keberhasilan kegiatan pendampingan ini dapat dilihat dari telah munculnya kesadaran dan pemahaman pentingnya akreditasi pada satuan pendidikan PKPPS. Sosialisasi kebijakan akreditasi pada

PKPPS perlu dilakukan, diaktifkan dan ditingkatkan mengingat masih banyak pondok pesantren di Lampung Timur yang belum terakreditasi. Sosialisasi sistem penilaian akreditasi dan keterbutuhan dokumen akreditasi diharapkan mampu menumbuhkan budaya mutu serta kesadaran akan pentingnya akreditasi pada lembaga pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada masyarakat.

Setelah kegiatan sosialisasi, maka dilakukan kegiatan pendampingan penyusunan dokumen akreditasi dengan metode *role playing* tentang bagaimana penyusunan, dan pendokumentasian seluruh dokumen pelaksanaan pendidikan di PKPPS Khidmatusunah. Hal ini dilakukan sebagai upaya mempersiapkan pendidikan kesetaraan keagamaan dalam bentuk PKPPS dalam menghadapi akreditasi melalui BAN PAUD dan PNF Provinsi Lampung kedepannya.

E. UCAPAN TERIMAKASIH

Tim Pengabdian kepada masyarakat mengucapkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM) IAIN Metro yang telah memberikan dukungan baik pendanaan, perizinan dan arahan selama kegiatan berlangsung. Ucapan terimakasih juga tim sampaikan kepada seluruh stakeholders PPKKPS Khidmatusunah yang telah bersedia mengikuti kegiatan pengabdian dari awal hingga akhir pengabdian ini.

F. DAFTAR PUSTAKA

- 31, P. N. (2020). *PMA No. 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren*.
- Awaludin, A. A. R. (2017). Akreditasi Sekolah sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 2(1), 12–21. <https://doi.org/10.30998/sap.v2i1.1156>
- Hasan, F., Fajarwati, L., & Imamyarha, D. (2021). Peningkatan Partisipasi Akreditasi Melalui Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Dokumen Akreditasi Delapan Standar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 27(2), 170–174.
- Herianto, E., Risprawati, D., & Alqadri, B. (2020). Pelatihan Dan Pendampingan Tentang Persiapan Akreditasi Dan Dampaknya Bagi Kesiapannya Dalam Menyongsong Akreditasi. *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 38–46. <https://doi.org/10.32938/jpm.v2i1.561>
- Indrawan, I. (2020). Pelaksanaan Kebijakan Akreditasi PAUD. *Mitra Ash-Shibyan*, 03(01), 46–54.
- Karsiwan, K. (2022). Sosialisasi Sistem Akreditasi dan Keterbutuhan Dokumen Akreditasi Pada PKPPS Khidmatusunah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (abdira)*, 2(2), 96–109. <https://doi.org/10.31004/abdira.v2i2.140>
- Muldiani, R. F., & Hadiningrum, K. (2020). *Peningkatan Manajemen Mutu Pos Paud Melati 10 Dan Kenanga 12 Menuju Persiapan Akreditasi PAUD*. 25–31.
- Nuryanto, S., & Irmade, O. (2019). Pendampingan Akreditasi Lembaga PAUD Di IGTKI Wonorego. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (JPM-IKP)*, 2(02), 86–93. <https://doi.org/10.31326/jmp-ikp.v2i02.443>
- Rahman, L. Z. (2020). Upaya Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Melalui Sistem Akreditasi Dalam Perspektif Total Quality Management (TQM) Di SD Muhammadiyah Karangbendo Bantul. *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 10(2), 201–215. <https://doi.org/10.33367/ji.v10i2.1270>

Wewe, M., Noge, M. D., Awe, E. Y., & Lawe, Y. U. (2021). Kegiatan Pendampingan Penyusunan Dokumen Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020 Di Sd Negeri Late. *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti*, 2(1), 116–127. <https://doi.org/10.38048/jailcb.v2i1.264>

Wijoyo, H. (2020). Sosialisasi Sistem Penilaian Akreditasi (SisPenA) Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau. *Jpm: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 7–10. <https://djournals.com/arbitrase/article/view/3>